



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2239 /ORI-SRT/XI/2018  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Seleksi Terbuka JPT-Pratama  
di lingkungan Ombudsman RI

27 November 2018

Kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Para Kepala Lembaga Non Struktural
4. Para Gubernur
5. Para Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia

di

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat di lingkungan instansi Saudara untuk mengikuti seleksi terbuka. Adapun jabatan yang akan diisi adalah :

1. JPT Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
2. JPT Pratama Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis
3. Inspektur

Ketentuan, persyaratan, dan tahapan seleksi dapat dilihat dalam pengumuman terlampir, atau melalui website [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).

Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ketua,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT	
TERIMA TANGGAL	11-12-018
AG. NO.	000 / 1398
UNTUK UNIT	Da I

## Daftar Instansi Penerima Surat

### Kementerian Negara:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan Indonesia
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Perindustrian
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
13. Kementerian Ketenagakerjaan
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Kementerian Kesehatan
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia
18. Kementerian Sosial
19. Kementerian Agama
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika
21. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
23. Kementerian Sekretariat Negara
24. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Pemuda dan Olahraga
30. Kementerian Pariwisata
31. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
32. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
33. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
34. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

## Daftar Instansi Penerima Surat

### Lembaga Non Kementerian:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Ekonomi Kreatif
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
6. Badan Kepegawaian Negara
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10. Badan Narkotika Nasional
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19. Badan Pertanahan Nasional
20. Badan Pusat Statistik
21. Badan SAR Nasional
22. Badan Standardisasi Nasional
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional
24. Lembaga Administrasi Negara
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27. Lembaga Ketahanan Nasional
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
29. Lembaga Sandi Negara
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

## Daftar Instansi Penerima Surat

### Lembaga Non Struktural

1. Dewan Ketahanan Nasional
2. Komisi Pemilihan Umum
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
5. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
7. Ombudsman Republik Indonesia
8. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum
11. Komisi Aparatur Sipil Negara
12. Komisi Penyiaran Indonesia
13. Komisi Informasi Pusat
14. Komisi Kejaksaan
15. Komisi Kepolisian Nasional
16. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
17. Komisi Nasional Lanjut Usia
18. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
19. Komisi Pengawas Haji Indonesia
20. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
21. Komisi Penyuluhan Nasional
22. Dewan Pengupahan Nasional
23. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
24. Dewan Pertimbangan Presiden
25. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
26. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
27. Dewan Riset Nasional
28. Dewan Sumber Daya Air Nasional
29. Dewan Pers
30. Dewan Energi Nasional
31. Dewan Insinyur Indonesia
32. Dewan Jaminan Sosial Nasional
33. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
34. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
36. Dewan Pertahanan Nasional
37. Dewan Ketahanan Pangan
38. Badan Amil Zakat Nasional
39. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
40. Badan Olahraga Profesional Indonesia
41. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
42. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
43. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
44. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
45. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
46. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
47. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
48. Badan Pertimbangan Kepegawaian
49. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
50. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
51. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
52. Badan Pertimbangan Telekomunikasi

53. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
54. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
55. Komite Akreditasi Nasional
56. Komite Anti Dumping Indonesia
57. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
58. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
59. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
60. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
61. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
62. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
63. Komite Perdagangan Nasional
64. Lembaga Kerja Sama Tripartit
65. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
66. Lembaga Produktivitas Nasional
67. Lembaga Sensor Film
68. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
69. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
70. Konsil Kedokteran Indonesia
71. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
72. Kantor Staf Presiden
73. Konsil Keperawatan
74. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
75. Badan Otorita Danau Toba
76. Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
77. Badan Restorasi Gambut
78. Komite Nasional Keuangan Syariah
79. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
80. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
81. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
82. Dewan Nasional Keuangan Inklusif
83. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
84. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
85. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
86. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
87. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
88. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
89. Komite Profesi Akuntan Publik
90. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
91. Otoritas Nasional Senjata Kimia
92. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
93. Komisi Nasional Disabilitas
94. Komite Industri Nasional
95. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
96. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
97. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

## Daftar Instansi Penerima Surat

### Gubernur:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Kepulauan Riau
6. Provinsi Jambi
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Provinsi Bengkulu
10. Provinsi Lampung
11. Provinsi DKI Jakarta
12. Provinsi Jawa Barat
13. Provinsi Banten
14. Provinsi Jawa Tengah
15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Provinsi Jawa Timur
17. Provinsi Bali
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Kalimantan Utara
25. Provinsi Sulawesi Utara
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Sulawesi Tengah
28. Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Provinsi Sulawesi Selatan
30. Provinsi Gorontalo
31. Provinsi Maluku
32. Provinsi Maluku Utara
33. Provinsi Papua Barat
34. Provinsi Papua